

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Walaupun demikian tidak semua Wajib Pajak mau dengan sukarela membayar pajaknya karena menganggap bahwa pajak sebagai suatu beban yang sama dengan biaya lainnya yang terjadi pada perusahaan yang perlu diperlakukan secara efisien. Pemerintah dalam rangka menanggulangi keresahan Wajib Pajak membuat suatu kebijakan baru, yaitu *Sunset Policy* yang hanya berlaku untuk tahun 2008 dan dibantu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan kebijakan ini dan memberikan arahan bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini untuk membayar pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan judul “Peranan *Sunset Policy* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan Wajib Pajak yang diambil adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. Agar penerimaan pajak meningkat diperlukan kesadaran dari Wajib Pajak dan masyarakat untuk membayar pajak serta kemampuan Wajib Pajak maupun masyarakat untuk memahami Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Wajib Pajak dan masyarakat telah dianggap dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya sendiri karena Indonesia juga menggunakan *self-assessment system*.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hipotesa yang diambil dari penelitian ini yaitu jika $\mu = 0$, *Sunset Policy* tidak berperan dalam peningkatan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi maka H_0 diterima, sedangkan jika $\mu \neq 0$, *Sunset Policy* berperan dalam peningkatan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi maka H_1 diterima. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa adanya *Sunset Policy* berperan terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi, maka H_1 diterima. Hal ini disimpulkan dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan metode regresi yaitu pengaruh sebesar 78,06% yang mengindikasikan hipotesis dapat diterima.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Manfaat bagi Akademisi	4
1.4.2 Manfaat bagi Praktisi Bisnis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1 Pengertian Pajak	6
2.1.1 Ciri Ciri yang Melekat pada Definisi Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	9
2.1.4 Jenis Pajak	11
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	14

2.1.6	Timbulnya Utang Pajak	19
2.1.7	Berakhirnya Utang Pajak	20
2.1.8	Hambatan Pemungutan Pajak	21
2.1.9	Pengertian <i>Sunset Policy</i>	22
2.1.10	Lingkup Pemberian Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi	23
2.1.11	Persyaratan Wajib Pajak Untuk Diberikan Penghapusan Sanksi Akibat Pembetulan SPT	26
2.1.12	Data dan Informasi dalam SPT Tahunan PPh	27
2.1.13	Pemeriksaan Pajak	27
2.2	Kerangka Pemikiran	29

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian	32
3.2	Metode Penelitian	32
3.2.1	Desain Penelitian	32
3.2.2	Jenis-jenis dan Sumber Data	32
3.2.3	Identifikasi Variabel	33
3.2.4	Metode Pengumpulan Data	33
3.2.5	Operasional Variabel	34
3.2.6	Analisis Pengujian Hipotesis	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	39
4.1.1	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama	39

4.1.2	Sejarah dan Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara	41
4.1.3	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak	43
4.1.4	Uraian Jabatan Kantor Pelayanan Pajak	43
4.1.5	Sistem Informasi yang Terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara	47
4.1.6	Sumber Daya yang Kompeten pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara	48
4.1.7	Pola Pengelolaan KPP Pratama	49
4.2	Pembahasan	49
4.2.1	Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> pada KPP Pratama Bojonagara Bandung	49
4.2.2	Peranan <i>Sunset Policy</i> Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi	54

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	59
5.2	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 Karakteristik Jenis KPP	40
Tabel 4.2 Perhitungan Statistika dengan Metode Regresi	54
Tabel 4.3 Laporan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2003-2007	58

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Permohonan Mengadakan Penelitian / Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dari Universitas Kristen Maranatha Bandung
2. Surat Izin Penelitian dari / Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I
3. Surat Izin Pengumpulan Data / Penelitian pada KPP Bandung Pratama Bojonagara dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I
4. Surat Pengumuman Tentang Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak (*Sunset Policy* 2008)
5. Siaran Pers “Perpanjangan Batas Waktu Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) UU KUP.